

TREN ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN SD DAN SMP DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TREND OF PRIMARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL ENROLLMENT RATES IN GUNUNGKIDUL DISTRICT

Oleh: ani rachmawati, Universitas Negeri Yogyakarta
anirachmawati.2017@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: mendeskripsikan tren angka partisipasi SD dan SMP di Gunungkidul kemudian kebijakan dan program yang telah diberikan Pemerintah Gunungkidul untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan SD dan SMP serta tindak lanjut dari Pemerintah Gunungkidul setelah melihat tren angka partisipasi pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan analisis data sekunder yang dilengkapi dengan metode wawancara. Analisis data menggunakan analisis trend jumlah kuadrat terkecil dengan tipe model linier dan persamaan $Y = a + bx$. Hasil penelitian ini adalah: 1. Tren APK SD dan SMP tahun 2019-2028 di Gunungkidul cenderung mengalami penurunan; 2. Kebijakan dan program yang telah dilakukan Pemerintah Gunungkidul yaitu PIP, beasiswa, dan bantuan sosial, program gerakan wajib belajar, program retrieval, google for education, dan diklat untuk pendidik; 3. Pemerintah Gunungkidul menindaklanjuti hasil tren APK SD dan SMP dengan melakukan validasi data, melanjutkan program yang efektif, dan memaksimalkan program retrieval.

Kata kunci: tren, angka partisipasi kasar, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kabupaten gunungkidul.

Abstract

This research aims to: 1. Describe the trend in the enrollment rate of SD and SMP in Gunungkidul; 2. Describe the policies and programs that have been provided by the Gunungkidul Government to increase enrollment rates for elementary and junior high schools; 3. Describe the follow-up action of the Gunungkidul Government after seeing the trend of elementary and junior high school enrollment rates in Gunungkidul Regency. This research uses descriptive quantitative research with secondary data analysis which is equipped with interview method. Analysis of the data using trend analysis of the number of least squares with the type of linear model and the equation $Y = a + bx$. The results of this study are: 1. The trend of GER for SD and SMP in 2019-2028 in Gunungkidul tends to decrease; 2. Policies and programs of the Gunungkidul Government through PIP, scholarships and social assistance, compulsory education movement programs, retrieval programs, google for education, and education and training for educators; 3. The Gunungkidul government is following up on the results of the SD and SMP GER trends by validating data, continuing effective programs, and maximizing retrieval programs.

Keywords: trends, gross participation rate, primary school, junior high school, gunungkidul regency.

PENDAHULUAN

Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang sukses, memiliki pendidikan yang tinggi dan

diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada orang tuanya yang hanya berpendidikan rendah. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena sejatinya anak

merupakan investasi terbesar bagi orang tua dan keluarganya. Setidaknya orang tua harus menyekolahkan anaknya di sekolah formal serendah-rendahnya selama 9 tahun yaitu dimulai dari Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau disebut sebagai pendidikan dasar.

Indonesia terdapat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 mengenai Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Instruksi Presiden ini, memuat langkah-langkah untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yaitu dengan meningkatkan persentase peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat terhadap penduduk usia 7-15 tahun atau disebut dengan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95%. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan berdasarkan pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar memiliki landasan hukum yaitu UUD

RI tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. Ayat (1) berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, hal tersebut berarti semua warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ayat (2) berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar artinya semua warga negara Indonesia harus bersekolah minimal pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan bantuan biaya yang berasal dari pemerintah.

Pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu bentuk implementasi dari UU RI No. 20 tahun 2003 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Warga negara usia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dimaksud adalah warga negara usia jenjang SD dan SMP, yang dalam hal ini usia-usia tersebut dikatakan wajib untuk bersekolah. Program pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat memberikan kemampuan dasar yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

Penelitian ini hanya terfokus pada pendidikan dasar SD dan SMP. Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang paling dasar yang ditempuh selama 6 tahun dari, pelajar Sekolah Dasar biasanya berusia 7-12 tahun. Setelah lulus

dari sekolah dasar, siswa dapat melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama yang ditempuh selama 3 tahun, pelajar SMP biasanya berusia 13-15 tahun. Namun dari rentang usia SD hingga SMP tersebut tidak semua dapat mengakses pendidikan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penyebab seperti faktor ekonomi yang lemah, sosial budaya masyarakat kurang mendukung, sarana prasarana yang tidak lengkap, kurangnya kualitas guru, letak geografis yang sulit dijangkau, dan persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan sebagai hal yang tidak penting.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, maka setiap warga negara harus menuntaskan pendidikan minimal tamat SMP/MTs atau sederajat.

Selanjutnya, apabila melihat fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata sampai ke wilayah-wilayah di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan angka partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang masih belum maksimal di beberapa daerah di Indonesia. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemdikbud Tahun 2018 menyebutkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) di Indonesia pada jenjang SD/MI dan sederajat sebanyak 105,89%. Sedangkan angka partisipasi kasar pada

jenjang SMP/MTs dan sederajat sebanyak 102,08%. Jika melihat data APK SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat di Indonesia dapat dikatakan bahwa angka partisipasi pendidikan di Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar sudah baik. Namun, masih ada wilayah-wilayah di Indonesia yang APKnya bahkan masih belum mencapai 100%.

DI Yogyakarta dengan predikat kota pelajar berada pada peringkat 32 dari 34 provinsi untuk jenjang SD, sedangkan untuk jenjang SMP berada pada peringkat 23 dari 34 provinsi dengan angka partisipasi kasar terendah di Indonesia. (Sumber: PDSPK Kemendikbud 2018)

Angka partisipasi kasar di DIY pada tahun 2018 pada jenjang SD sebesar 98,96%, dengan jumlah anak usia 7-12 tahun sebanyak 321.600 orang, jumlah siswa SD sebanyak 318.263 orang, dan jumlah siswa usia 7-12 tahun sebesar 293.441 orang. Sedangkan angka partisipasi kasar DIY untuk jenjang SMP sebesar 100,93%, dengan jumlah anak usia 13-15 tahun sebanyak 159.400 orang, jumlah siswa SMP sebanyak 160.876 orang, dan jumlah siswa usia 13-15 tahun sebesar 126.278 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi pendidikan di DIY pada jenjang SMP lebih besar daripada jenjang SD.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud

tahun 2018 mengenai APK dari setiap kabupaten di DIY yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta tentunya memiliki jumlah APK yang berbeda. APK SD yang tertinggi yaitu di Kabupaten Bantul yang mencapai 101,86% dan APK terendah yaitu Kota Yogyakarta dengan APK sebesar 93,03%. Untuk SMP, APK tertinggi yaitu di Kota Yogyakarta yang mencapai 102,26% dan APK terendah terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 98,90%.

Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah dengan penduduk terbanyak ketiga di provinsi DIY setelah Sleman dan Bantul. Gunungkidul memiliki berbagai potensi perekonomian, mulai dari pertanian, peternakan dan perikanan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang, serta pariwisata. Potensi-potensi tersebut memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan, diharapkan dengan adanya pemerataan pendidikan akan membentuk generasi muda di Kabupaten Gunungkidul dapat melestarikan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Angka partisipasi kasar di Gunungkidul menurut Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud pada tahun 2018 untuk SD mencapai 98,13%. Sedangkan pada jenjang SMP pada tahun 2018 APK di Gunungkidul sebesar 98,90%. Melihat hal tersebut, dapat diketahui bahwa APK di

Gunungkidul belum maksimal, bahwa belum dapat mencapai angka 100% untuk jenjang SD maupun SMP. Jika melihat dari Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan persentase APK SD dan SMP di Kabupaten Gunungkidul yang telah melebihi harapan pemerintah yaitu 95%. Namun, persentase APK di Kabupaten Gunungkidul jika dibandingkan dengan Kabupaten Lain di DIY masih termasuk salah satu yang terendah atau belum maksimal.

Berdasarkan penjelasan diatas, belum maksimalnya angka partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maka perlu adanya upaya untuk dapat memaksimalkan angka partisipasi pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan angka partisipasi pendidikan yaitu dengan membuat kebijakan. Menentukan kebijakan memerlukan beberapa tahapan, salah satunya adalah tahap peramalan (*forecasting*).

Peramalan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis trend. Melihat hal ini, peneliti tertarik untuk mengetahui tren angka partisipasi pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Gunungkidul selama 10

tahun kedepan. Kemudian belum ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tren angka partisipasi pendidikan jenjang SD dan SMP di Gunungkidul. Dipilih dalam kurun waktu 10 tahun kedepan karena kebijakan ataupun program yang diterapkan dapat dikontrol dalam jangka waktu yang cukup panjang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dan dengan menggunakan metode analisis data sekunder.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan dari bulan Januari hingga Maret 2021.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu data anak yang terlayani SD dan SMP selama lima tahun yaitu dari tahun 2014-2018, serta data anak usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun dari tahun 2014-2018 yang ada di Gunungkidul.

Definisi Operasional Variabel

APK merupakan suatu perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan kemudian dibandingkan dengan jumlah

penduduk yang sesuai dengan usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara yang mana menghasilkan data kualitatif akan digunakan sebagai pendukung data yang sebelumnya telah diperoleh peneliti serta digunakan untuk melengkapi hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari sumber sekunder mengenai data APK, data kebijakan atau program, data anak terlayani SD, dan data anak terlayani SMP dari tahun 2014-2018, data anak usia 7-12 dan 13-15 tahun di Gunungkidul. Sedangkan wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber Kepala Bidang SD dan SMP Dinas Dikpora Gunungkidul. Wawancara termasuk dalam wawancara informal.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tren jumlah kuadrat terkecil dengan data ganjil yaitu dari tahun 2014-2018 untuk Kabupaten Gunungkidul. Kemudian perhitungan tren menggunakan *Microsoft Excel Windows 2010*. Peneliti melihat bahwa garis pada gambar data yang telah peneliti analisis memiliki kecenderungan linier. Dalam tipe model linier terdapat rumus atau persamaan yaitu $Y = a + bx$. Kemudian dalam proses untuk menganalisis data-data hasil wawancara sebagai pelengkap dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode reduksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa tren APK jenjang SD di Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut:

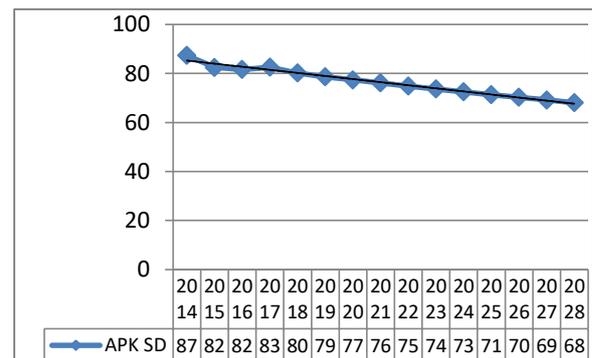
Tabel 1. Tren Angka Partisipasi SD di Gunungkidul (Hasil Olahan)

Tahun	Tren Anak Terlayani SD	Anak Usia 7-12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD (%)
2014	51.197	58.594	87,37
2015	51.286	62.210	82,44
2016	50.803	62.291	81,55
2017	50.867	61.651	82,50
2018	50.388	62.898	80,11
2019	50.297	63.944	78,65
2020	50.093	64.748	77,36
2021	49.890	65.553	76,10

Tahun	Tren Anak Terlayani SD	Anak Usia 7-12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD (%)
2022	49.686	66.358	74,87
2023	49.482	67.163	73,67
2024	49.279	67.968	72,50
2025	49.075	68.773	71,35
2026	48.871	69.578	70,23
2027	48.668	70.383	69,14
2028	48.464	71.188	68,07

Sumber: Olah Data (menggunakan *Microsoft Excel Windows 2010*)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tren APK pada jenjang SD di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 hingga tahun 2028 semakin menurun jika dilihat dan dibandingkan dengan APK tahun 2014 hingga tahun 2018, sehingga untuk prediksi APK SD di Kabupaten Gunungkidul cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Gunungkidul menurun. Berikut grafik prediksi APK SD di Gunungkidul.



Gambar 1. Grafik APK Jenjang SD

Selanjutnya, tabel tren APK pada jenjang SMP di Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut:

Tabel 2. Tren APK SMP di Kabupaten Gunungkidul (Hasil Olahan)

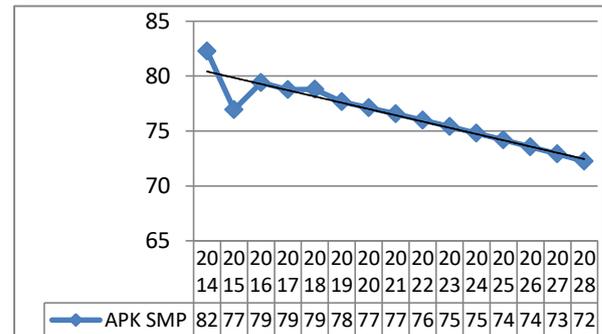
Tahun	Tren Anak Terlayani SMP	Anak Usia 13-15 Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP (%)
2014	25.090	30.494	82,27
2015	24.706	32.107	76,94
2016	24.247	30.536	79,40
2017	23.639	30.012	78,76
2018	23.413	29.712	78,79
2019	22.893	29.475	77,66
2020	22.451	29.109	77,12
2021	22.009	28.743	76,57
2022	21.566	28.377	75,99
2023	21.124	28.011	75,41
2024	20.682	27.645	74,81
2025	20.240	27.279	74,19
2026	19.798	26.913	73,56
2027	19.356	26.547	72,91
2028	18.914	26.181	72,24

Sumber: Olah Data (menggunakan *Microsoft Excel Windows 2010*)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tren APK SMP di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 hingga tahun 2028 semakin rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014 hingga 2018. Untuk prediksi APK SMP dari tahun 2019 hingga 2028 cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada anak usia 13-15 tahun di

Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan.

Berikut merupakan hasil prediksi tren APK jenjang SMP:



Gambar 2. Grafik APK SMP

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa APK SD maupun APK SMP di Kabupaten Gunungkidul keduanya mengalami prediksi yang terus mengalami penurunan, bahkan untuk APK SD dan SMP di Kabupaten Gunungkidul belum mencapai angka 100%. Hal tersebut juga terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Juliasandi (2015) yang melaksanakan penelitian di DIY untuk meneliti APK jenjang PAUD. Hasilnya menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul menjadi satu-satunya kabupaten di DIY yang APK PAUD nya diprediksi belum dapat mencapai 100%. APK yang masih rendah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah anak-anak di Kabupaten Gunungkidul masih rendah atau belum maksimal.

Tren APK untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunungkidul yang diketahui

melalui perhitungan analisis tren model linier dengan metode jumlah kuadrat terkecil dan diketahui masing-masing hasil prediksi sebagai berikut:

1. Hasil prediksi Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 hingga tahun 2028 mengalami penurunan mencapai 68,07% pada tahun 2028.
2. Hasil prediksi Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 hingga tahun 2028 mengalami penurunan mencapai 72,24% pada tahun 2028.

Tilaar & Nugroho (2008:411) menjelaskan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) memiliki kegunaan untuk dapat mengetahui banyaknya anak-anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berdasarkan pendapat tersebut artinya tingginya angka partisipasi kasar dapat menunjukkan bahwa semakin banyak anak yang terlayani dalam pendidikan SD dan SMP, sebaliknya jika angka partisipasi kasar rendah maka menunjukkan bahwa anak yang terlayani SD dan SMP masih belum maksimal. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Tilaar dan Nugroho, maka hasil penelitian untuk APK jenjang SD dan APK jenjang SMP di Kabupaten Gunungkidul belum maksimal. Naik atau menurunnya angka

partisipasi kasar ini tidak lepas dari peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta masyarakat dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan SD dan SMP.

Pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota, yang mana dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berperan penting dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan SD maupun SMP dengan membentuk suatu kebijakan maupun program-program guna untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah yang merupakan birokrasi pendidikan umumnya telah mampu menjalankan wewenang yang dimilikinya. Menurut Rohman (2014:165) birokrasi pendidikan memiliki wewenang atau kekuasaan administrasi pemerintahan yaitu memberikan pelayanan publik, melakukan pengawasan publik, dan melakukan pengenalan terhadap partisipasi publik tentunya dalam bidang pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga telah melakukan beberapa kegiatan dan program yang bertujuan untuk usaha peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gunungkidul. Kebijakan dan program tersebut antara lain yaitu:

1. Pemberian beasiswa. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memberikan beasiswa atau bantuan sosial bagi anak-anak yang rentan dan terancam putus sekolah yang disebabkan karena faktor ekonomi.
2. Menggalakkan program Gerakan Wajib Belajar. Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sosialisasi program gerakan wajib belajar menjadi salah satu program yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang SMP di Gunungkidul. Program ini diperuntukkan pada daerah-daerah di Gunungkidul yang kasus pernikahan dininya tinggi. Selain itu juga dilakukan pada wilayah-wilayah yang memiliki kasus putus sekolah yang tinggi.
3. Program Retrieval. Program retrieval ini merupakan suatu program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan menyekolahkan kembali atau menarik kembali anak-anak yang mengalami putus sekolah untuk dapat bersekolah kembali.
4. Program Google for education. Program ini bekerjasama dengan Google Indonesia untuk jenjang SD di Kabupaten Gunungkidul, yang telah berjalan selama tiga tahun yaitu mulai dari 2018 hingga sekarang tahun 2021 dan akan terus berlanjut. Program ini memanfaatkan google sebagai salah satu media untuk jalannya proses pendidikan yaitu dengan menggunakan google class room dalam proses belajar mengajar.
5. Program diklat untuk guru SD. Program ini dilaksanakan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi para pendidik pada jenjang SD. Tujuan dilaksanakannya diklat bagi pendidikan ini adalah agar kualitas para pendidik SD di Gunungkidul selalu meningkat, dengan begitu akan dapat melahirkan siswa-siswa yang berkualitas pula.

Proses pembuatan kebijakan meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Dalam penelitian ini telah dilakukan estimasi atau prediksi untuk angka partisipasi pendidikan SD dan SMP di Gunungkidul, maka langkah selanjutnya adalah adopsi kebijakan atau pengambilan keputusan. William N. Dunn (2003:24) berpendapat bahwa dalam tahap adopsi kebijakan ini, alternatif kebijakan akan dipilih dan juga diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif serta konsensus atau kesepakatan kelembagaan.

Melihat dari pendapat tersebut maka dalam tahap adopsi kebijakan ini pembuat kebijakan harus mampu untuk membuat sebuah keputusan dengan mempertimbangkan estimasi atau konsekuensi di masa yang akan datang. Keputusan dalam penelitian ini merupakan sebuah tindak lanjut dari hasil estimasi tren APK SD dan SMP yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga telah merencanakan berbagai tindak lanjut dalam memaksimalkan partisipasi pendidikan khususnya jenjang SD dan SMP di Kabupaten Gunungkidul. Melihat hasil tren dari angka partisipasi pendidikan jenjang SMP yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Dinas Pendidikan Gunungkidul) berencana untuk melakukan validasi data-data sehingga akan selalu diperoleh data-data yang valid. Selain itu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul berencana untuk melanjutkan program-program yang selama ini telah efektif dalam meningkatkan angka partisipasi kasar APK jenjang SMP. Kemudian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan memaksimalkan program *retrivel* agar anak-anak yang mengalami putus sekolah dapat kembali ke sekolah dan juga memberikan beasiswa-beasiswa pada anak-anak yang kurang mampu.

Kemudian tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul setelah melihat hasil tren dari angka partisipasi pendidikan jenjang SD yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berencana untuk tetap menggunakan dan melanjutkan program yang telah dilakukan dengan mengembangkan sesuai perkembangan jaman dan teknologi. Program-program tersebut yaitu menggunakan model pembelajaran dengan *google class room*. Selain itu juga memaksimalkan program *mbatik* untuk mengasah kreativitas siswa dan menjadikan program *batik* sebagai salah satu daya tarik agar anak-anak terutama usia SD berminat untuk sekolah. Kemudian memaksimalkan program cerdas matematika, dan mengembangkan layanan aplikasi untuk mendampingi pendidikan SD di Gunungkidul.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tren Angka Partisipasi SD dan SMP di Kabupaten Gunungkidul, maka dapat disimpulkan:

1. Tren APK SD dan SMP yang diprediksi untuk 10 tahun kedepan mulai tahun 2019-2028 di Kabupaten Gunungkidul pada jenjang SD dan

SMA mengalami kecenderungan menurun. Serta untuk estimasi/prediksi APK SD maupun SMP selama 10 tahun kedepan di Gunungkidul belum mencapai 100%.

2. Kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemerintah Gunungkidul untuk meningkatkan angka partisipasi jenjang SD dan SMP yaitu dengan pembiayaan pendidikan melalui PIP, beasiswa, dan bantuan sosial lainnya. Selain itu, pemerintah Gunungkidul juga melaksanakan program gerakan wajib belajar, program *retrieval*, *google for education*, dan diklat-diklat bagi para pendidik.
3. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menindaklanjuti hasil tren APK SD dan SMP dengan berencana untuk melakukan validasi data-data sehingga akan selalu diperoleh data-data yang valid, kemudian melanjutkan program-program yang selama ini telah efektif dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Gunungkidul, dan memaksimalkan program *retrieval* serta memberikan beasiswa-beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan mengenai Tren Angka Partisipasi Pendidikan SD dan

SMP di Kabupaten Gunungkidul, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai upaya memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Dikpora Gunungkidul
 - a. Melihat hasil prediksi tren APK yang menurun dan belum mencapai 100% di masa mendatang, maka pemerintah harus mengencangkan sosialisasi pendidikan terutama bagi keluarga yang memiliki anak usia 7-15 tahun agar pola pikir masyarakat di Gunungkidul berubah dan sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga para orang tua akan memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan anak-anaknya.
 - b. Melaksanakan kembali program *retrieval* atau penjemputan kembali anak-anak yang putus sekolah, karena faktor anak tidak bersekolah bukan hanya disebabkan faktor ekonomi saja melainkan juga kurangnya motivasi dari orang tua maupun lingkungan untuk bersekolah.
 - c. Penguatan program *parenting* terutama pada wilayah-wilayah yang jumlah kasus pernikahan dini

- dan rawan putus sekolahnya tinggi.
- d. Menambahkan Pusat Kegiatan Belajar mengajar (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di setiap kecamatan untuk memudahkan dalam pelaksanaan program Paket A dan Paket B.
2. Bagi Keluarga dan Masyarakat
 - a. Menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi pendidikan, misalnya dengan menerapkan dan memaksimalkan program jam belajar masyarakat.
 - b. Orang tua harus menjadi *role model* yang baik bagi anak-anaknya dan memberikan motivasi serta pemahaman kepada anak mengenai pentingnya pendidikan, agar anak termotivasi untuk bersekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- Juliasandi, M.M. (2015). *Tren Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kemdikbud. (2018). *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2018*. Jakarta: PDSPK Kemdikbud. Diakses pada tanggal 16 April 2021, dari <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>.
- Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta:Aswaja Pressindo
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.